



Media: BERNAS

Hari: Jumat

Tanggal: 12 Februari 2010

Halaman: 1

Pekan Depan Selesai Didata

PKL Malioboro Sudah Maksimal

JOGJA --Pendataan PKL Malioboro ditargetkan akan selesai pekan depan. Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Malioboro, Purwanto mengatakan, saat ini proses pendataan telah selesai 90 persen. Pendataan di lapangan yang dimulai sejak 18 Januari itu akan selesai pekan ini selanjutnya akan direkap dan pekan depan telah ada data baru PKL.

"Pekan depan sudah komplit pendataan dan data hasilnya. Kalau pendataan di lapangan sudah 90 persen dan akan selesai pekan ini," ungkapnya, kemarin. Sebelumnya, dijadwalkan pendataan yang menerjunkan dua orang petugas itu akan memakan waktu selama sebulan.

Menurut Purwanto, hasil dari pendataan tersebut akan menjadi da-

tabase PKL yang ada di kawasan Malioboro. Nantinya, data tersebut akan menjadi acuan dari semua kebijakan terkait pengelolaan PKL di kawasan yang menjadi salah satu ikon pariwisata Yogyakarta itu.

Pendataan ulang itu juga dimaksudkan untuk meminimalisir adanya

>> KE HAL 10

PKL Malioboro Sudah Maksimal

Sambungan dari halaman 1

PKL liar di kawasan Malioboro. Pendataan dilakukan meliputi nama pedagang, alamat tinggal, serta luas dan lokasi berjualan. Setelah pendataan, UPT Malioboro akan mengeluarkan kartu identitas PKL bagi PKL di kawasan itu.

"Dari pendataan itu sekaligus kami buat peta lokasi yang pasti dari para PKL, sehingga kami akan mudah melakukan pengecekan di lapangan. Dan bisa lebih mengontrol sewa menyewa lahan PKL pada pihak lain," jelasnya.

Data PKL kawasan Malioboro yang ada sebelumnya merupakan hasil pendataan dari kecamatan. Pendataan itu dilakukan sebelum terbentuknya UPT Malioboro. Selama ini kartu identitas PKL dan izin dikeluarkan oleh pihak kecamatan. Ke depan, pemberian izin lokasi dan kartu identitas PKL akan dibagikan oleh UPT Malioboro.

Berdasarkan pendataan kecamatan yang telah ada sebelumnya, jumlah PKL di kawasan Malioboro sebanyak 1.350 PKL. Dari jumlah itu terbagi dalam dua

kelompok yaitu PKL Souvenir pakaian dan kerajinan sejumlah 1.200 PKL, dan PKL makanan lesehan sebanyak 150 PKL.

Dari hasil pendataan, nantinya akan diketahui jumlah PKL yang telah memiliki izin dan yang belum.

Bagi yang belum mempunyai izin, kata Purwanto, diharapkan melakukan pengurusan pengajuan izin dengan melengkapi persyaratan-persyaratan yang ditentukan.

Purwanto mengatakan, di kawasan Malioboro tidak dimungkinkan lagi ada penambahan PKL karena lokasinya telah penuh.

Dan jika ada PKL baru pun untuk mendapatkan izin harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.

"Prosedurnya PKL mengambil blanko di kantor UPT Malioboro kemudian diisi lengkap. Selanjutnya harus dimintakan tanda tangan PKL sekitarnya berjualan, toko lokasi berjualan, Rt dan Rw, LPMK, lurah, dan camat setempat. Kalau sudah memenuhi persyaratan-persyaratan itu baru kami bisa mengeluarkan izin," jelasnya. (e16)

urkan Kepada Yth. :
 . Walikota Yogyakarta
 . Wakil Walikota Yogyakarta
 . Sekretaris Daerah
 . Asisten

usan Kepada Yth. :

Instansi	Nilai	<input type="checkbox"/> Negatif	<input type="checkbox"/> Amat Segera	<input type="checkbox"/> Untuk ditanggapi
1. <u>UPT Malioboro</u>				

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Humas dan Informasi	Positif	Biasa	Untuk Diketahui
2. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan			
3. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Per			
4. Dinas Ketertiban			
5. UPT. Malioboro			

Yogyakarta, 01 Oktober 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM

